

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KOTA BATU

Shenia Nilla Sari, M. Faisal Abdullah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

* Corresponding author: shenianill24@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 21 May 2019

Revised 28 May 2019

Accepted 19 June 2019

Available online 21 June 2019

Keyword: ADD; Effectiveness village funds allocation; SWOT analysis

JEL Classification

Abstract

The purpose of this research is to find out the effectiveness of the management of village fund allocation in the Village Government in Batu City and to find out the opportunities and challenges faced in managing ADD. Data analysis used in this study is to use the effectiveness measurement ratio in accordance with the effectiveness criteria and use the SWOT analysis. The results of this study indicate the effectiveness of the management of village fund allocations in 19 villages in Batu City in 2017-2018 already in effective criteria. Opportunities faced in ADD management are the role of the role of the city government, the sub-district government and village facilitators, the synergy between the city and village governments, the information system, the increasing welfare of the community and the economy and improving village infrastructure facilities and infrastructure. The challenges faced in the management of ADD are the uncertainty of the ADD disbursement process, the reduced budget from the city government, the success rate of the program that is not according to plan and the delay in regulation regarding village financial management.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Negara Indonesia sudah membuka ruang bagi pemerintahan daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah yang secara efisien dan efektif maka sangat ditentukan penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, karena pemerintahan desa memiliki beberapa fungsi yaitu, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan yang lebih nyata dan faktual. Dengan munculnya Undang-Undang Desa, desa disebut sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, proses otonomi telah membawa kabupaten/kota dan desa untuk menata kembali potensi daerah yang selama ini belum tertata secara efektif (Sudarti, Malik, & Sutikno, 2010). Undang-Undang tersebut memberikan dampak perubahan secara signifikan dan positif dalam hal tata kelola pemerintahan desa. Berjalannya Undang-Undang tersebut diberlakukan tidak serta merta memberikan nilai positif di setiap desa, namun bisa memotivasi untuk lebih meningkatkan potensi sumber daya yang ada di desa tersebut menjadi yang terbaik dan berkualitas sehingga dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka mampu untuk meningkatkan potensi desa tersebut. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut memberikan dampak perubahan secara signifikan dan positif dalam hal tata kelola pemerintahan desa. Berjalannya Undang-Undang tersebut diberlakukan tidak serta merta memberikan nilai positif di setiap desa, namun bisa memotivasi untuk lebih meningkatkan potensi sumber daya yang ada di desa tersebut menjadi yang terbaik dan berkualitas sehingga dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka mampu untuk meningkatkan potensi desa tersebut.

Sudah sangat jelas, bahwa desa memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga desanya dalam segala hal aspek, baik dalam aspek pelayanan, aspek pengaturan maupun aspek pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas kapasitas pemerintah desa maupun potensi sumber dayanya maka dapat memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk dan kegiatan dalam pembangunan desa yang efektif maupun efisien. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Tentunya untuk mewujudkan semua itu pemerintah desa juga membutuhkan dukungan dana. Salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksudkan mampu memberikan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa serta mampu memberikan pelayanan yang prima dan baik dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan program pembangunan baik secara fisik maupun non fisik sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program kegiatan Desa. (Sari & Abdullah, 2017)

Dalam pengelolaan alokasi dana desa diterapkan asas Transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Untuk pembagian alokasi dana desa sendiri menggunakan asas merata dan adil, dimana asas merata ini yaitu pembagian alokasi dana desa yang sama setiap desa, selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan disebut dengan adil yaitu pembagian alokasi dana desa yang dibagi secara proposional untuk setiap desa yang dilihat dari nilai bobot desa dengan menghitung menggunakan rumus dengan variable independen yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan, keterjangkauan serta jumlah unit komunitas desa disebut dengan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). Dengan adanya alokasi dana desa maka kinerja pemerintah desa dituntut untuk mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Efektif yang dimaksud disini merupakan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Efektivitas menurut (Sondang P. Siagian, 2015) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa terutama alokasi dana desa (ADD) untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu target maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengelolaan alokasi dana desa dengan peraturan atau regulasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Alokasi Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Susilowati, Susilowati, & Hadi, 2017). Pembagian dalam Alokasi Dana Desa sendiri yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional (Wijaya, Arifin, & Hadi, 2018). Dalam penelitian ini mengkaji pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintah desa yang berada di Kota Batu tahun 2017-2018, terpilihnya lokasi ini yaitu dimana Kota Batu merupakan kota kecil yang sudah mandiri, seperti yang dijelaskan oleh Content Strategist di Creative.teknoia.com dimana Kota Batu semenjak berkembang pesat menjadi wilayah pariwisata telah berkembang dari bagian Kabupaten Malang, menjadi kota mandiri dan desa-desanya yang bisa dilihat sudah berkembang, seperti dijelaskan di (Malang, n.d.) 17 April 2018 menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso sebanyak 19 Desa di Kota Batu mendapat predikat desa berkembang dan desa maju, oleh karena itu untuk melihat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa lebih tertarik dengan desa-desa yang ada di Kota Batu, dimana di Kota Batu terdapat 19 Desa yang menerima alokasi dana desa yaitu di Kecamatan Batu ada desa Sumberejo, Oro-Oro Ombo, Sidomulyo dan Pesanggrahan, di Kecamatan Bumiaji ada desa Punten, Gunungsari, Tulungrejo Sumbergondo, Pandanrejo, Bumiaji, Giripurno, Bulukerto dan Sumberbrantas, serta di Kecamatan Junrejo ada desa Beji, Junrejo, Tlekung, Mojorejo, Pendem dan Desa Torongrejo. Pada tahun 2017 desa yang menerima Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu pada Desa Tulungrejo sebesar Rp 1,957,678,228 sedangkan yang menerima Alokasi Dana Desa terendah terletak pada desa Mojorejo sebesar Rp 900,924,027 . Pada tahun 2018 desa yang menerima Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu pada Desa Pesanggrahan sebesar Rp 4,267,341,176 sedangkan yang menerima Alokasi Dana Desa terendah terletak pada Desa Sumbergondo sebesar Rp 2,337,873,148. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu, yang kedua peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu.

Pada penelitian yang dilakukan Saputra berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014 sudah berada dikategori efektif. Hambatan yang dialami dalam merealisasikan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu pemahaman masyarakat terhadap ADD, adanya miss komunikasi dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja serta anggaran dana cadangan.

Berikutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muntahanah dan Murdijaningsih yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis penelitiannya yaitu analisis interatif dengan 3 komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah efektif, dari tahap pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya sudah efektif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Safitri yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2017. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Butuh sudah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas yang memperoleh hasil sebesar 92%, transparansi yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat baik dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban serta faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sangat baik

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang pengelolaan efektivitas alokasi dana desa (ADD) dengan menggunakan rasio efektivitas serta menggunakan analisis SWOT.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini yaitu di 19 Desa yang ada di Kota Batu. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian mix metode yaitu kuantitatif dan kualitatif dimana datanya berupa angka yang dapat dihitung secara nyata dan mendeskripsikan. Data yang digunakan yaitu berupa data Alokasi Dana Desa tahun 2017-2018 di 19 desa yang ada di Kota Batu serta wawancara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota Batu yang berjumlah 19 desa. Teknik pengumpulan sampel yaitu menggunakan metode sensus yang dimana semua populasi dijadikan sampel. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu 19 desa di Kota Batu itu artinya penelitian ini menggunakan seluruh desa yang ada di Kota Batu.

Definisi operasional, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Kota Batu, alokasi dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pemerintah desa, data yang digunakan yaitu dalam bentuk anggaran realisasi penerimaan dan target penerimaan di 19 Desa di Kota Batu tahun 2017-2018 dengan menggunakan rasio pengukuran efektivitas, rasio pengukuran efektivitas yaitu dalam bentuk perhitungan dari

anggaran realisasi belanja ADD dibagi dengan target penerimaan ADD di 19 Desa Kota Batu tahun 2017-2018 serta analisis SWOT yaitu hasil wawancara tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa di Kota Batu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis model interaktif. Selain menggunakan kedua teknik tersebut, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT. Teknik analisis deskriptif menggunakan rasio pengukuran efektivitas (Aspasia & Nuraini, 2018) dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi belanja ADD } i}{\text{Target Penerimaan ADD } i} \times 100\%$$

Dengan melihat kriteria pengukuran efektivitas sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan		
No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Jika diatas 100% maka sangat efektif (SE), antara 90-100% maka efektif (E), antara 80-90% maka bisa dikatakan cukup efektif (CE), dan antara 60-80% maka kurang efektif (KE) serta kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif (TE). (Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Pemerintah Desa di Kota Batu tahun anggaran 2017-2018 serta apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perhitungan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa terutama alokasi dana desa (ADD) untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Semakin tinggi Rasio efektivitas, maka menggambarkan bahwa kemampuan desa tersebut semakin baik, begitupun sebaliknya, semakin rendah Rasio Efektivitas, maka menggambarkan bahwa kemampuan desa tersebut belum baik.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan ADD Tahun 2017 Desa di Kota Batu

No	Desa	Target/Anggaran	RealisasiBelanja	%	Std
1	Desa Sumberejo	1,131,522,526.00	1,131,522,526.00	100%	S E
2	Desa Oro-Oro Ombo	1,320,957,283.00	1,320,957,283.00	100%	S E
3	Desa Sidomulyo	1,102,613,935.00	1,102,613,935.00	100%	S E
4	Desa Pesanggrahan	1,360,433,546.00	1,472,306,858.00	108%	S E
5	Desa Punten	979,456,189.00	979,456,189.00	100%	S E
6	Desa Gunungsari	1,349,818,762.00	1,348,318,762.00	100%	S E
7	Desa Tulungrejo	1,957,678,228.00	1,957,678,228.00	100%	S E
8	Desa Sumbergondo	1,045,436,065.00	1,045,436,065.00	100%	S E
9	Desa Pandanrejo	1,132,731,221.00	1,080,101,057.00	95%	S E
10	Desa Bumiaji	1,204,805,554.00	1,204,805,554.00	100%	S E
11	Desa Giripurno	1,717,205,240.00	1,717,205,240.00	100%	S E
12	Desa Bulukerto	1,199,133,347.00	1,199,133,347.00	100%	S E
13	Desa Sumberbrantas	1,139,805,693.00	1,139,805,693.00	100%	S E
14	Desa Beji	1,039,671,925.00	1,039,671,925.00	100%	S E
15	Desa Junrejo	1,052,799,440.00	1,052,799,440.00	100%	S E
16	Desa Tlekung	1,033,018,719.00	1,033,018,719.00	100%	S E
17	Desa Mojorejo	900,924,027.00	900,924,027.00	100%	S E
18	Desa Pendem	1,124,725,982.00	1,124,725,982.00	100%	S E
19	Desa Torongrejo	1,039,268,317.00	1,200,117,290.00	115%	S E

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1 perhitungan efektivitas pengelolaan ADD dengan menggunakan Rasio Efektivitas pada tahun anggaran 2017 efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di semua desa yang ada di Kota Batu dinyatakan efektif, karena berdasarkan rasio efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kota Batu tahun 2017 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Namun pada Desa Pesanggrahan dan Desa Torongrejo yang melebihi 100%. Pada Desa Pesanggrahan sebesar 1,472,305,858 rupiah dengan rasio efektivitasnya sebesar 108% dan Desa Torongrejo sebesar 1,200,117,290 rupiah dengan rasio efektivitasnya sebesar 115%. Kedua desa ini menggunakan alokasi dana desa (ADD) melebihi anggaran yang diberikan. Sedangkan untuk Desa Pandanrejo justru anggaran alokasi dana desa yang diberikan tidak digunakan sepenuhnya yaitu hanya sebesar 1,080,101,057 rupiah dengan rasio efektivitasnya sebesar 95%. Penyebab efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sudah dinyatakan efektif yaitu dengan terealisasinya alokasi dana desa dengan baik.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pengelolaan ADD Tahun 2018 Desa di Kota Batu

No	Desa	Target/Anggaran	RealisasiBelanja	%	Std
1	Desa Sumberejo	2,814,854,845.00	2,814,854,845.00	100%	S E
2	Desa Oro-Oro Ombo	2,975,986,780.00	3,398,315,794.00	114%	S E
3	Desa Sidomulyo	2,369,703,621.00	2,502,241,584.00	106%	S E
4	Desa Pesanggrahan	4,267,341,176.00	4,409,031,515.00	103%	S E
5	Desa Punten	2,447,072,963.00	2,514,282,992.00	103%	S E
6	Desa Gunungsari	3,009,950,834.00	3,435,700,618.00	114%	S E
7	Desa Tulungrejo	3,714,810,877.00	4,080,098,006.00	110%	S E
8	Desa Sumbergondo	2,337,873,148.00	2,543,867,168.00	109%	S E
9	Desa Pandanrejo	2,724,672,204.00	2,819,048,924.00	103%	S E
10	Desa Bumiaji	2,404,731,193.00	2,429,221,240.00	101%	S E
11	Desa Giripurno	3,276,548,897.00	3,762,587,897.00	115%	S E
12	Desa Bulukerto	2,713,026,847.00	2,921,359,655.00	108%	S E
13	Desa Sumberbrantas	2,710,654,657.00	3,344,707,568.00	123%	S E
14	Desa Beji	2,578,302,673.00	2,578,302,673.00	100%	S E
15	Desa Junrejo	2,727,012,894.00	2,896,116,140.00	106%	S E
16	Desa Tlekung	2,341,899,954.00	2,341,899,954.00	100%	S E
17	Desa Mojorejo	2,550,370,680.00	2,783,411,397.00	109%	S E
18	Desa Pendem	2,665,288,698.00	2,787,087,335.00	105%	S E
19	Desa Torongrejo	2,800,549,459.00	2,717,779,697.00	97%	S E

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 perhitungan efektivitas pengelolaan ADD dengan menggunakan Rasio Efektivitas pada tahun anggaran 2018 efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di semua desa yang ada di Kota Batu dinyatakan efektif, namun dapat dilihat pada tahun anggaran 2018 kebanyakan desa di Kota batu menggunakan alokasi dana desa melebihi anggaran yang diberikan, sehingga hasil yang diperoleh melebihi 100%. Hanya tiga desa yang menggunakan anggaran alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan yang diberikan, yaitu desa Sumberejo, desa Beji dan desa Tlekung. Penyebab efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sudah dinyatakan efektif yaitu dengan terealisasinya alokasi dana desa dengan baik.

Pada penelitian ini efektivitas pengeloan alokasi dana desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di 19 desa yang ada di Kota Batu sudah berada dalam kategori sangat efektif. Meskipun tergolong sangat efektif namun ada beberapa desa yang tingkat efektivitasnya tidak berada dalam 100%, ini disebabkan karena jumlah anggaran yang diterima tidak semua terealisasikan. Namun pada tahun 2018 kebanyakan desa melebihi dari 100%, dimana realisasi belanja lebih besar dari anggaran yang diterima, ini disebabkan karena belanja pegawai yang meningkat, semakin tahun kebutuhan desa semakin banyak, terjadinya kenaikan harga barang yang dimana harga barang tersebut setiap tahunnya berbeda, serta kebutuhan program kegiatan yang setiap tahunnya bertambah dan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Untuk

menanggulangi kelebihan dana yang dikeluarkan, pemerintah desa menggunakan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sehingga alokasi dana desa (ADD) dapat terealisasi dengan baik.

Dari 19 desa yang ada di Kota Batu berbeda-beda program kegiatan yang dilakukan. Ada empat penggunaan alokasi dana desa yaitu pada bidang penyelenggaraan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang pembinaan kemasyarakatan, dari keempat bidang tersebut anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan tersebut setiap desanya berbeda-beda. Berikut program-program kegiatan dari salah satu desa di Kota Batu. Desa Sumberejo, pada tahun 2017 ada program operasional taman kanak-kanak desa, operasional Karang Taruna dimana dana yang diberikan oleh desa bisa terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 program pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah dan sarana pengelolaan sampah, dana yang diberikan sudah terealisasi dengan baik.

Pada desa Oro-Oro Ombo program-program yang dilakukan dengan dana Alokasi Dana Desa kurang lebih sama. Bedanya jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya bertambah, karena setiap tahun anggaran ADD yang diterima meningkat. Pada tahun 2017 ada program bantuan insentif guru PAUD dimana dana tersebut sudah terealisasi dengan baik, ada juga program operasional penyelenggaraan lomba desa. Pada tahun 2018 ada program pembangunan rest area, dimana dana tersebut sudah terealisasi dengan baik sehingga rest area sudah digunakan.

Pada desa Giripurno program-program yang dilakukan dengan dana Alokasi Dana Desa kurang lebih sama. Bedanya jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya bertambah, karena setiap tahun anggaran ADD yang diterima meningkat. Pada tahun 2017 ada program Reboisasi dan pembangunan pemeliharaan daerah aliran sungai dana tersebut sudah terealisasi dengan baik, sehingga desa Giripurno bebas dari longsor dan daerah pemukiman sungai bebas dari banjir. Pada tahun 2018 ada program pembangunan selokan/gorong-gorong dan plengsengan sungai dana tersebut sudah terealisasi dengan baik.

Desa Bulukerto, pada tahun 2017 ada program forum anak dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 ada program pembangunan tempat pembuangan sampah dan jalan desa antara wilayah pertanian dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada desa Pandanrejo program-program yang dilakukan dengan dana Alokasi Dana Desa kurang lebih sama. Bedanya jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya bertambah, karena setiap tahun anggaran ADD yang diterima meningkat. Pada tahun 2017 ada program operasional Karang Taruna, dana tersebut sudah terealisasi dengan baik, dana tersebut sudah digunakan untuk acara desa oleh sekelompok remaja di desa tersebut. Pada tahun 2018 ada program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya dana tersebut sudah terealisasi dengan baik.

Desa Tlekung, pada tahun 2017 ada program penyelenggaraan lomba desa dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 ada program selokan/gorong-gorong serta jalan pemukiman dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada desa Junrejo program-program yang dilakukan dengan dana Alokasi Dana Desa kurang lebih sama. Bedanya

jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya bertambah, karena setiap tahun anggaran ADD yang diterima meningkat. Pada tahun 2017 ada program forum anak dimana para remaja desa melakukan sosialisasi tentang seks bebas, narkoba dll dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 ada program karang taruna dana tersebut sudah terealisasi dengan baik.

Pada desa Pendem program-program yang dilakukan dengan dana Alokasi Dana Desa kurang lebih sama. Bedanya jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya bertambah, karena setiap tahun anggaran ADD yang diterima meningkat. Pada tahun 2017 ada program peningkatan kapasitas sumber daya dana tersebut sudah terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 ada program bedah rumah warga miskin dana tersebut sudah terealisasi dengan baik sehingga bedah rumah tersebut sudah terlaksana.

Peluang dan Tantangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam penelitian ini untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu menggunakan analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT tersebut dapat diuraikan secara rinci dan jelas menggunakan matriks analisis SWOT yang diolah berdasarkan identifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dimiliki desa-desa yang ada di Kota Batu secara umum. Berikut tabel matriks analisis SWOT :

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT di Desa-Desa Kota Batu

		Strength (S)	Weaknesses (W)
		Internal	Menunjang perkembangan desa
Masih banyak potensi desa yang masih bisa dikembangkan	Kurang disiplin dalam mematuhi jadwal tahapan pelaksanaan pembangunan desa yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan APBDes		
Eksternal	Adanya pendamping desa	Adanya keterlambatan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa	
	Memiliki sistem informasi yang cukup baik		
Opportunities (O)		Strategi S-O	Strategi W-O
Peran pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam mendampingi desa		Meningkatkan peran pemerintah kota, kecamatan serta pendamping desa dalam mendampingi desa dalam pengelolaan ADD (S3, O1)	Meningkatkan SDM yang belum memadai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (S1, O3)

(dilanjutkan pada hal 10)

(Lanjutan halaman 9)

Sinergitas antara pemerintah kota dan pemerintah desa dalam menjalankan program kegiatan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa serta kesejahteraan masyarakat untuk menunjang perkembangan desa dengan memanfaatkan potensi yang masih ada (S1, S2, O3, O4)	Meningkatkan peran pemerintah kota, kecamatan dan pendamping desa dalam mengatasi keterlambatan regulasi terkait pengelolaan ADD serta pelaksanaan pembangunan desa (W2, W3, O1)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur desa	Mengembangkan sistem informasi dengan mempermudah pemerintah kota dan desa dalam menjalankan suatu program kegiatan (S4, O2)	
Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Ketidakpastian dalam proses pencairan ADD	Memanfaatkan pendamping desa dalam pengelolaan ADD yang baik agar anggaran yang dikeluarkan tidak berkurang (S3, T2)	Memperbaiki sistem pelaksanaan pembangunan desa dengan meningkatkan keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan (W2, T3)
Berkurangnya anggaran dari pemerintah kota	Meningkatkan sistem informasi sehingga mempermudah pemerintah desa untuk mengetahui informasi terkait proses pencairan ADD (S4, T1)	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa (W3, T2)
Tingkat keberhasilan program yang telah direncanakan tidak sesuai	Menciptakan potensi desa dengan baik dengan mengelola program kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (S2, T3)	

Sumber : Data diolah

Penelitian yang dilakukan dengan analisis SWOT dapat diketahui beberapa faktor peluang dan tantangan dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Berikut beberapa faktor peluang dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) :

1. Peran pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pendamping desa dalam pengelolaan alokasi dana desa terkait dengan perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan evaluasinya sangatlah penting, karena dengan adanya peran kedua instansi tersebut dapat meminimalisir kesalahan dalam mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

2. Dalam pengelolaan alokasi dana desa sinergitas antara pemerintah kota dan pemerintah desa sangat diperlukan, karena jika salah satu dari pihak tersebut lalai maka pengelolaan alokasi dana desa tidak akan terealisasi dengan baik.
3. Dalam pengelolaan alokasi dana desa salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa, karena kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang penting, desa tersebut bisa dikatakan berkembang dan maju jika kesejahteraan masyarakatnya terealisasi dengan baik begitu pula dengan perekonomian desa, jika alokasi dana desa tidak terealisasi dengan baik maka bisa dikatakan bahwa perekonomian desa tersebut sangatlah buruk.
4. Untuk merealisasikan alokasi dana desa dengan baik yaitu salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur desa.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD karena tidak sedikit adanya faktor tantangan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut, beberapa faktor tantangannya yaitu adanya ketidakpastian dalam proses pencairan ADD, berkurangnya anggaran dari pemerintah kota. Tingkat keberhasilan program yang telah direncanakan tidak sesuai dan adanya keterlambatan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Pemerintah Desa di Kota Batu tahun 2017-2018, maka yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa di Kota Batu tahun 2017-2018, dimana pengukuran efektivitas menggunakan rasio efektivitas dengan melihat kriteria efektivitas kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan rasio efektivitas, efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sudah efektif. Meskipun pada tahun 2018 kebanyakan melebihi dari 100%, itu disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja lebih besar daripada anggaran yang diterima.

Peluang dan Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa di 19 desa Kota Batu lebih dominan terhadap kekuatan dan peluang, namun tidak sedikit adanya hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan penelitian, adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang efektivitas keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas, masih kurangnya penjelasan faktor-faktor dalam Analisis SWOT dan kurangnya jurnal pendukung yang dapat memperkuat penelitian ini.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka

dapat saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah supaya realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran lagi, maka pemerintah desa harus lebih terperinci dalam merinci kebutuhan / biaya yang diperlukan serta untuk menanggulangi adanya keterlambatan dalam proses pencairan ADD, maka seharusnya pemerintah desa lebih cepat dalam menyelesaikan laporan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspasia, A. N., & Nuraini, I. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2017.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2018.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Malang, S. (n.d.). Tahun 2018, Sebanyak 19 Desa di Kota Batu Harus “Naik Kasta” Sebagai Desa Mandiri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sondang P. Siagian. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarti, Malik, N., & Sutikno. (2010). Model Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 02.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dana Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2.